

## **Respon BPK**

**KETUA** Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Sambas, Akhyani, memberikan apresiasi atas upaya penyuluhan hukum kepada masyarakat melalui program desa binaan sadar hukum. "Kita minta program ini dapat terlaksana karena berdasarkan pertemuan dengan Kajati Kalbar, sudah ada alokasi anggaran sosialisasi hukum. Jangan sampai program ini tidak terlaksana," pinta Akhyani kepada *Tribun*, Jumat (30/12).

Ia juga meminta penegakan hukum harus benar-benar terlaksana dengan baik di masa-masa mendatang. Jangan sampai ada tebang pilih kasus. Semua harus dilakukan memenuhi rasa keadilan dan kemanusiaan.

"Penegakan hukum harus profesional, trans-

paran, dan akuntabel. Jangan sampai hukum menjadi alat kekuasaan serta alat untuk mengubah aturan hukum yang telah ditetapkan. Masyarakat perlu tahu terkait transparansi hukum yang telah diatur UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik," paparnya.

Ia juga menyorot penanganan perkara korupsi yang sangat penting. Sebab korupsi telah merugikan negara dan merugikan masyarakat luas karena tindak pidana korupsi memakan uang rakyat. Jadi harus ditindak tegas.

"Kejaksanaan harus lebih responsif terhadap temuan-temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Jangan sampai temuan-temuan itu hanya sebatas laporan. Kita minta kejaksanaan ke depan lebih baik," ujarnya. (shr)